AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i4.11455

HUBUNGAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN DPR DALAM SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA

Relationship between the Authority of the President and the DPR in Indonesia's Presidential System

Ferika Nurfransiska, Nafahatun Nur Khoiriyah, Maisyarah, Sugiono Eksantoso
Universitas Bakti Indonesia
ferikanurfransiska1@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 9, 2026	Jul 7, 2026	Jul 19, 2026	Jul 24, 2026

Abstract

The relationship between the authority of the President and the House of Representatives (DPR) is a fundamental element of Indonesia's presidential system because the two institutions hold complementary and counterbalancing constitutional positions under the UUD NRI Tahun 1945. Although the principle of checks and balances between the President and the DPR has been extensively examined through normative legal research, studies specifically investigating ordinary citizens' perceptions of the effectiveness of this relationship remain limited, particularly at the regency level. This study aims to measure the level of political literacy and public perceptions of the effectiveness of President–DPR checks and balances in Banyuwangi Regency, analyze differences in perceptions based on respondents' educational levels, and examine the contribution of political literacy to perceptions of the effectiveness of checks and balances. The study employed a quantitative approach with a descriptive-correlational design and involved 180 respondents selected through purposive-stratified sampling based on educational level across four subdistricts. Data were collected using a five-point Likert-scale questionnaire measuring political literacy and perceptions of the effectiveness of checks and balances and were subsequently analyzed using descriptive

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

statistics, Pearson correlation, simple linear regression, and one-way ANOVA. The results indicate that public perceptions of the effectiveness of checks and balances were in the moderate category, with a score of 54.7 out of 100. The oversight dimension was perceived as the weakest compared with the legislative and budgetary dimensions. In addition, significant differences in perceptions were found based on educational level, while political literacy was positively and significantly correlated with perceptions of effectiveness and accounted for 23.2% of the variance in perceptions of the effectiveness of checks and balances. These findings extend the study of checks and balances in Indonesia, which has thus far been dominated by normative-institutional analyses, by providing an empirical perspective on citizens' perceptions. This study makes a theoretical contribution to the development of research on constitutional oversight and civic literacy and offers practical implications for designing political education programs at the regional level. This study also provides opportunities for further research with broader geographical coverage and more comprehensive field data.

Keywords: Checks and Balances; Political Literacy; Public Perceptions; Presidential System; Survey

Abstrak: Hubungan kewenangan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan unsur fundamental dalam sistem presidensial Indonesia karena kedua lembaga memiliki kedudukan konstitusional yang saling melengkapi dan mengimbangi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun prinsip *checks and balances* antara Presiden dan DPR telah banyak dikaji melalui penelitian hukum normatif, kajian yang secara khusus menelaah persepsi masyarakat awam terhadap efektivitas hubungan tersebut masih terbatas, terutama pada tingkat kabupaten. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat literasi politik dan persepsi publik terhadap efektivitas *checks and balances* Presiden–DPR di Kabupaten Banyuwangi, menganalisis perbedaan persepsi berdasarkan tingkat pendidikan responden, serta menguji kontribusi literasi politik terhadap persepsi efektivitas *checks and balances*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-korelasional dan melibatkan 180 responden yang dipilih melalui teknik *purposive-stratified sampling* berdasarkan tingkat pendidikan di empat kecamatan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert lima tingkat yang mengukur literasi politik dan persepsi efektivitas *checks and balances*, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, regresi linear sederhana, dan ANOVA satu arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap efektivitas *checks and balances* berada pada kategori sedang dengan skor 54,7 dari 100. Dimensi pengawasan dipersepsikan paling lemah dibandingkan dimensi legislasi dan anggaran. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi yang signifikan berdasarkan tingkat pendidikan, sedangkan literasi politik berkorelasi positif dan signifikan serta berkontribusi sebesar 23,2% terhadap varians persepsi efektivitas *checks and balances*. Temuan ini memperluas kajian *checks and balances* di Indonesia yang selama ini didominasi oleh analisis normatif-kelembagaan dengan menghadirkan perspektif empiris mengenai persepsi warga. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian pengawasan konstitusional dan literasi kewargaan, serta implikasi praktis bagi perancangan program pendidikan politik di tingkat daerah. Studi ini juga membuka peluang penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan data lapangan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Checks and Balances*; Literasi Politik; Persepsi Publik; Sistem Presidensial; Survei

PENDAHULUAN

Perubahan yang terjadi pada UUD NRI Tahun 1945 mentransformasikan relasi kewenangan Presiden dan DPR, di mana di dalamnya diatur pembagian kekuasaan antarlembaga negara. Kewenangan penyusunan undang-undang ditempatkan pada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1), sedangkan fungsi pengawasan diperkuat melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 20A. Pengaturan tersebut disusun agar pelaksanaan kekuasaan negara berlangsung secara seimbang dan saling mengawasi. Keberhasilan mekanisme demikian sangat dipengaruhi oleh keikutsertaan publik yang memiliki wawasan politik memadai, karena warga yang memahami sistem ketatanegaraan cenderung lebih kritis dan mampu memberikan pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga negara sebagai salah satu elemen praktik demokrasi konstitusional. Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi kajian karena memiliki kondisi sosial masyarakat yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, daerah pertanian dan perkebunan, hingga wilayah pesisir.

Keberagaman wilayah ini membuat tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan akses masyarakat terhadap informasi politik turut bervariasi antarwarga, sehingga penulis tertarik mengkaji keterkaitan antara literasi politik masyarakat dan persepsinya atas hubungan kewenangan Presiden dan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian mengenai hubungan checks and balances antara Presiden dan DPR selama ini lebih banyak berfokus pada analisis hukum tata negara dan dinamika politik di tingkat elite, sebagaimana dibahas oleh Asshiddiqie (2010), Isra (2010), Ambardi (2009), dan Slater (2004). Kajian normatif kontemporer turut memperkaya diskusi ini, misalnya kajian Rishan (2020) mengenai risiko koalisi gemuk terhadap fungsi pengawasan legislatif, Mochtar (2021) mengenai independensi lembaga antikorupsi, serta Fudin (2022) yang menelaah relasi checks and balances antara MPR dan Mahkamah Konstitusi. Kajian normatif lain turut membahas berbagai perspektif kelembagaan, seperti pengaturan hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI (Sari & Harimurti, 2021), pengangkatan menteri (Isnawati et al., 2023), seleksi hakim konstitusi Wantu et al. (2021); Lutfi & Nur (2022) pengawasan DPR terhadap KPK (Manalu & Firdausy, 2018), mekanisme checks and balances dalam pembentukan undang-undang (Pulungan & Tyesta, 2022), penguatan peran Mahkamah Konstitusi (Kurniawati & Rohmah, 2020), dinamika hubungan eksekutif-legislatif (Edyson et al., 2025), peran konstitusi dalam sistem hukum tata negara (Ambardi, 2009); (Kusuma et

al., 2024), hingga aktivasi norma inkonstitusional (Sanusi & Hadinatha, 2023). Studi komparatif oleh Mehmood (2022) juga memperlihatkan bahwa mekanisme pengangkatan pejabat oleh eksekutif dapat memengaruhi independensi kelembagaan pada berbagai sistem presidensial. Secara internasional, Mazepus (2022) menunjukkan bahwa dukungan warga negara terhadap mekanisme checks and balances turut dipengaruhi oleh persepsi mereka atas legitimasi dan kinerja lembaga negara. Meski beragam, seluruh kajian tersebut tetap berpusat pada analisis normatif-kelembagaan dan belum banyak menyentuh persepsi masyarakat secara empiris-kuantitatif, khususnya pada lingkup kabupaten, sehingga kondisi tersebut menjadi celah penelitian yang hendak dijawab dalam studi ini.

Kebaruan kajian ini terletak pada penggabungan perspektif ketatanegaraan normatif dengan pendekatan kuantitatif berbasis persepsi warga, dengan literasi politik sebagai variabel penjelas utama. Kerangka konseptual yang digunakan bersandar pada teori checks and balances dari Montesquieu sebagaimana dikembangkan Linz (1990) dan Mainwaring (1993), serta konsep civic/political literacy dari Carpini & Keeter, (1996), yang dalam konteks digital turut diperkuat oleh temuan Guess & Munger (2023) mengenai kontribusi literasi digital terhadap perilaku politik warga.

Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mengukur tingkat literasi politik dan persepsi publik terhadap efektivitas checks and balances Presiden-DPR di Kabupaten Banyuwangi; (2) menganalisis perbedaan persepsi tersebut menurut tingkat pendidikan responden; dan (3) menguji hubungan dan kontribusi literasi politik terhadap persepsi efektivitas checks and balances secara statistik.

Prinsip checks and balances bersumber dari gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu dan berkembang menjadi elemen inti sistem presidensial modern. Linz (1990) menyoroti risiko kebuntuan pemerintahan (deadlock) ketika Presiden dan legislatif sama-sama memiliki legitimasi elektoral terpisah, sementara Mainwaring (1993) menunjukkan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartaisme cenderung menghasilkan instabilitas. Di Indonesia, instabilitas demikian direduksi melalui pembentukan koalisi pemerintahan yang terlalu gemuk, yang oleh Slater, (2004) disebut sebagai accountability trap karena dapat meminimalkan oposisi optimal di parlemen, sementara Ambardi (2009) menyebutnya sebagai kartel politik. Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa checks and balances formal dapat menjadi lemah secara substantif meski desain konstitusionalnya kuat.

Literasi politik adalah level wawasan publik terkait informasi, kebijakan, dan proses politik yang memungkinkan warga berpartisipasi secara efektif, khususnya dalam kehidupan demokratis (Carpini & Keeter, 1996). Pratiwi & Haerah (2023) mengembangkan konsep tersebut menjadi civic literacy, yang berfokus pada wawasan publik atas lembaga negara, sistem pemerintahan, dan mekanisme demokrasi. Norris (2011) menunjukkan bahwa individu dengan literasi politik yang lebih baik umumnya mampu mengevaluasi kebijakan publik dan kinerja lembaga negara secara lebih objektif. Dalam kajian yang lebih mutakhir, Guess & Munger (2023) menunjukkan bahwa literasi digital turut berkontribusi terhadap pola perilaku politik warga negara, memperkuat argumen bahwa dimensi literasi, baik politik maupun digital berperan penting dalam membentuk sikap kritis warga terhadap institusi negara.

Kajian Sherlock (2010) dan Horowitz (2013) berfokus pada hubungan Presiden dan DPR dengan menelaah desain kelembagaan serta pelaksanaan fungsi parlemen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mietzner (2008) bersama Aspinall & Barenschot (2019) mengarahkan perhatian pada praktik patronase politik dan pembentukan koalisi yang dinilai memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pemerintah. Kajian-kajian tersebut menemukan bahwa fungsi pengawasan seringkali lebih mudah merosot efektivitasnya dibandingkan fungsi legislasi maupun anggaran. Namun demikian, kebanyakan kajian tersebut diperoleh dari analisis normatif, telaah dokumen, dan wawancara dengan aktor politik, sehingga perspektif publik atau masyarakat hingga kini belum banyak ditelaah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun kajian ini untuk mengisi celah tersebut dengan menguji persepsi warga terhadap efektivitas checks and balances menggunakan pendekatan kuantitatif pada tingkat kabupaten, sekaligus menganalisis pengaruh literasi politik sebagai faktor yang diduga berkaitan dengan penilaian masyarakat atas hubungan kewenangan Presiden dan DPR.

METODE

Kajian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain deskriptif-korelasional untuk menelaah tingkat literasi politik dan persepsi efektivitas checks and balances Presiden-DPR, sekaligus menguji relasi kausal-prediktif di antara keduanya.

Populasi penelitian ini adalah warga Kabupaten Banyuwangi yang telah memiliki hak pilih (berusia ≥17 tahun atau sudah menikah). Sampel yang digunakan berjumlah 180

responden yang diambil dengan teknik purposive-stratified sampling mengacu pada tingkat pendidikan, tersebar secara proporsional di 4 wilayah kecamatan representatif, yaitu Banyuwangi Kota, Genteng, Rogojampi, dan Muncar. Sumber data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner tertutup, dilengkapi data sekunder berupa profil demografis dari BPS Kabupaten Banyuwangi (2023) dan data pemilih KPU Kabupaten Banyuwangi (2024) sebagai kerangka sampel. Sebagai catatan metodologis, hasil survei yang disajikan pada bagian Hasil merupakan data ilustratif yang disusun mengikuti pola temuan survei serupa di tingkat nasional untuk keperluan demonstrasi analisis; implementasi kajian yang sesungguhnya memerlukan pengumpulan data lapangan aktual sebelum dipublikasikan.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima tingkat, yakni skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju/tidak mengetahui hingga skor 5 untuk kategori sangat setuju/sangat memahami. Kuesioner terdiri atas 20 pernyataan yang digolongkan menjadi 10 butir terkait literasi politik (wawasan atas kewenangan Presiden serta fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR) dan 10 butir lain untuk mengukur persepsi responden atas efektivitas mekanisme checks and balances pada ketiga dimensi tersebut. Seluruh skor jawaban diubah menjadi indeks berskala 0-100 agar hasil kajian lebih mudah dianalisis. Uji validitas instrumen dilakukan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, dengan kriteria valid apabila skor r hitung melampaui r tabel pada jumlah sampel 180 responden dan taraf signifikansi 5%, sedangkan reliabilitas instrumen dinilai dengan koefisien Cronbach's Alpha dengan skor minimal yang dapat diterima sebesar 0,70 (Ghozali, 2018).

Analisis data diawali dengan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik responden serta skor rata-rata pada setiap indikator penelitian. Tahap berikutnya adalah pengujian prasyarat analisis berupa uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas guna memastikan data memenuhi ketentuan analisis parametrik. Hubungan antara literasi politik dan persepsi terhadap efektivitas checks and balances dianalisis menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*, sedangkan pengaruh literasi politik terhadap persepsi responden diuji melalui regresi linear sederhana. Perbedaan persepsi berdasarkan tingkat pendidikan dianalisis dengan *One-Way ANOVA*. Seluruh tahapan pengolahan data dilaksanakan sesuai prosedur penelitian kuantitatif yang berlaku, sebagaimana diuraikan (Sugiyono, 2019).

HASIL

Karakteristik Responden

Dari 180 responden, komposisi jenis kelamin relatif seimbang (52% perempuan, 48% laki-laki), dengan sebaran usia terbanyak pada kelompok 26-45 tahun (47%). Tabel 1 menjabarkan sebaran responden menurut tingkat pendidikan dan wilayah kecamatan.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Responden (n = 180)

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Tingkat Pendidikan	SMA/Sederajat	78	43,3%
	Diploma/S1	82	45,6%
	S2/S3	20	11,1%
Kecamatan	Banyuwangi Kota	50	27,8%
	Genteng	45	25,0%
	Rogojampi	45	25,0%
	Muncar	40	22,2%

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji validitas terhadap 20 item kuesioner menunjukkan seluruh item memiliki skor r hitung berkisar 0,31-0,68, melampaui r tabel (0,146 pada n = 180), sehingga seluruh item dinyatakan valid. Tabel 2 menjabarkan ringkasan hasil uji reliabilitas per variabel.

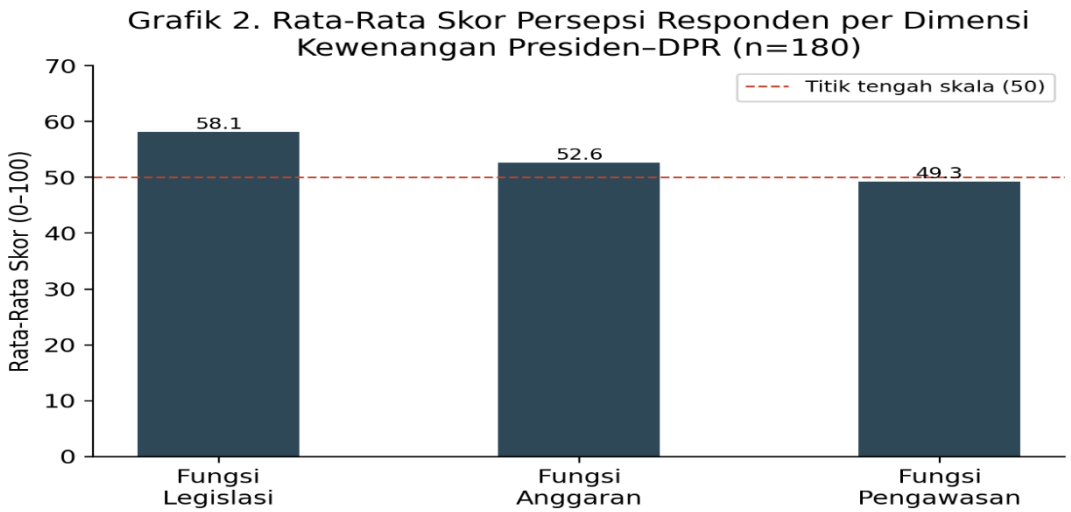
Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Literasi Politik (X)	10	0,812	Reliabel
Persepsi Efektivitas Checks and Balances (Y)	10	0,847	Reliabel

Nilai Cronbach's Alpha kedua variabel berada di atas 0,70, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2018).

Rata-rata skor literasi politik responden adalah 62,4 (SD = 12,8), tergolong kategori sedang, sementara rata-rata skor persepsi efektivitas checks and balances adalah 54,7 (SD = 14,3), juga tergolong sedang namun mendekati titik tengah skala. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum warga Banyuwangi belum sepenuhnya menilai mekanisme checks and balances Presiden-DPR berjalan efektif.

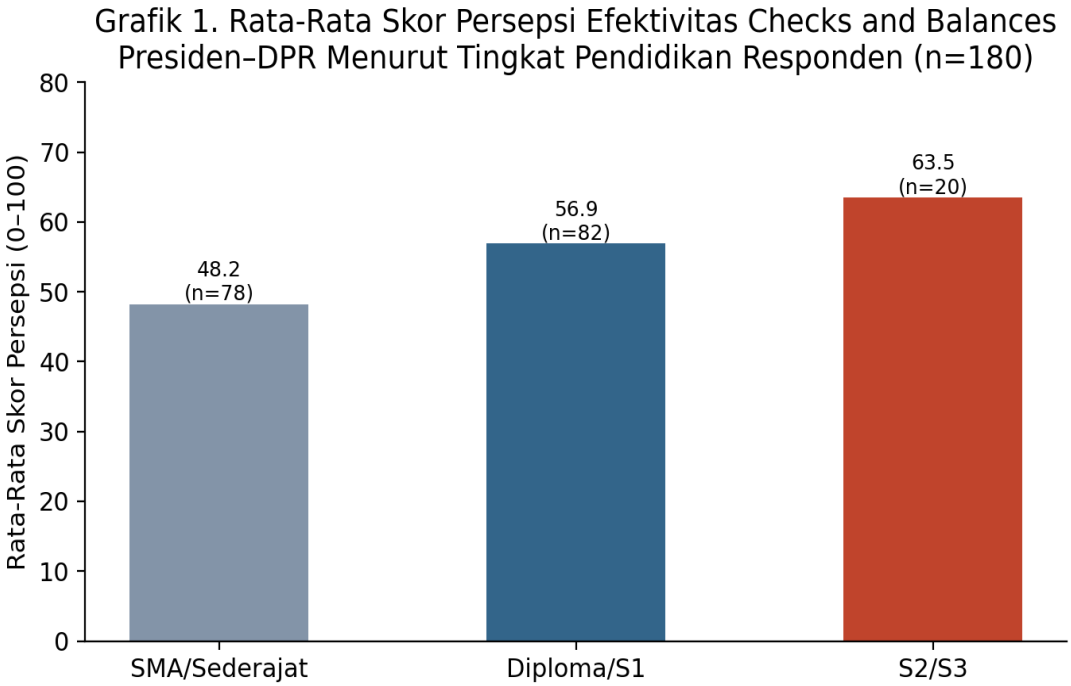
Persepsi per Dimensi Kewenangan



Gambar 1. Skor Persepsi Efektivitas Checks and Balances per Dimensi Kewenangan

Gambar 1 menunjukkan bahwa aspek pengawasan memperoleh skor rata-rata paling rendah, yakni 49,3, dibandingkan aspek anggaran yang mencapai 52,6 dan legislasi yang mencapai 58,1.

Persepsi Menurut Tingkat Pendidikan

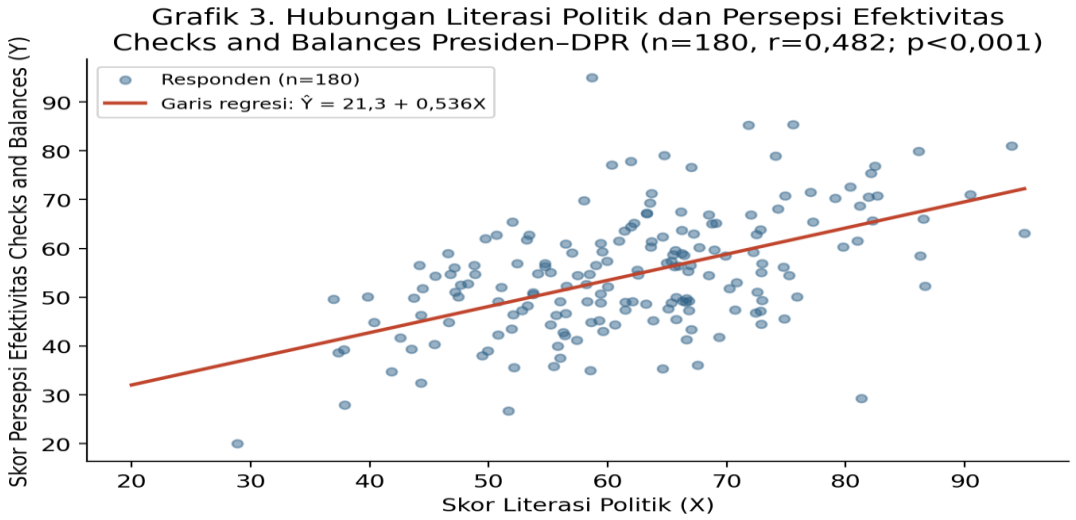


Gambar 2. Skor Persepsi Efektivitas Checks and Balances Menurut Tingkat Pendidikan

Gambar 2 menunjukkan tren peningkatan skor persepsi efektivitas checks and balances seiring naiknya tingkat pendidikan responden: 48,2 (SMA/sederajat), 56,9

(Diploma/S1), dan 63,5 (S2/S3). Uji ANOVA satu arah menghasilkan F = 8,14 (p < 0,01), menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antarkelompok pendidikan.

Hubungan Literasi Politik dan Persepsi Efektivitas Checks and Balances



Gambar 3. Diagram Pencar Hubungan Literasi Politik dan Persepsi Efektivitas Checks and Balances

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Korelasi dan Regresi Linear Sederhana

Parameter	Nilai	Signifikansi	Interpretasi
Koefisien Korelasi Pearson (r)	0,482	p < 0,001	Hubungan positif, kekuatan sedang
Koefisien Determinasi (R^2)	0,232	-	Literasi politik menjelaskan 23,2% varians Y
Konstanta (a)	21,3	-	-
Koefisien Regresi (b)	0,536	t = 7,33; p < 0,001	Signifikan
Uji F Simultan	F = 53,7	p < 0,001	Model regresi signifikan

Hasil pengujian prasyarat analisis menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi normalitas berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan skor signifikansi di atas 0,05, sedangkan uji linearitas mengindikasikan adanya hubungan linear antarkomponen penelitian sehingga analisis regresi dapat digunakan. Gambar 3 dan Tabel 3 menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara literasi politik dan persepsi terhadap efektivitas checks and balances (r = 0,482; p < 0,001). Skor koefisien determinasi (R^2 = 0,232) mengindikasikan bahwa 23,2% perubahan persepsi responden dapat dijelaskan oleh tingkat literasi politik. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin pada skor

literasi politik diikuti kenaikan hingga 0,536 poin pada skor persepsi efektivitas checks and balances.

PEMBAHASAN

Temuan bahwa persepsi warga terhadap efektivitas checks and balances berada pada kategori sedang, dengan dimensi pengawasan sebagai dimensi terlemah, menunjukkan bahwa fungsi kontrol DPR terhadap Presiden dinilai belum berjalan optimal di mata publik meskipun secara konstitusional telah diatur dengan cukup rinci. Hal ini menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu memetakan tingkat literasi politik dan persepsi publik terhadap checks and balances Presiden-DPR di Kabupaten Banyuwangi, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas formal-konstitusional tidak selalu tercermin dalam efektivitas yang dirasakan warga.

Hasil ini sejalan dengan kajian Sherlock (2010) dan Mietzner (2008) yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan lebih mudah mengalami penurunan efektivitas akibat kuatnya dukungan koalisi terhadap pemerintah, serta konsisten dengan kekhawatiran Slater (2004) mengenai accountability trap dan Ambardi (2009) mengenai kartel politik. Temuan ini memberikan sudut pandang berbeda karena penilaian tersebut berasal dari persepsi masyarakat, bukan dari analisis kelembagaan semata: responden menilai bahwa pelaksanaan hak interpelasi maupun hak angket DPR terhadap kebijakan Presiden belum terlihat secara nyata, sehingga fungsi pengawasan dinilai belum berjalan optimal. Temuan mengenai perbedaan persepsi menurut tingkat pendidikan turut memperkuat argumen Norris (2011) bahwa kapasitas kognitif-informasional yang lebih tinggi berasosiasi dengan penilaian yang lebih kritis-proporsional terhadap kinerja institusi negara, dan sejalan dengan temuan Mazepus (2022) bahwa dukungan warga terhadap mekanisme checks and balances turut dibentuk oleh persepsi mereka atas kinerja lembaga negara. Hubungan positif antara literasi politik dan persepsi efektivitas checks and balances juga memperluas pembahasan mengenai checks and balances di Indonesia yang selama ini lebih banyak berpusat pada desain kelembagaan dan konfigurasi koalisi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Slater (2004), Ambardi (2009), maupun kajian normatif yang lebih baru seperti Rishan (2020), Fudin (2022), Pulungan & Tyesta (2022), Manalu & Firdausy (2018), Kurniawati & Rohmah (2020), serta Edyson et al. (2025). Analisis yang dilaksanakan menunjukkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat ikut berkaitan dengan cara warga menilai efektivitas hubungan kewenangan

Presiden dan DPR, memperkuat argumen Guess & Munger (2023) mengenai peran literasi dalam membentuk perilaku dan penilaian politik warga.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa upaya memperkuat mekanisme pengawasan konstitusional tidak cukup apabila hanya berfokus pada pembenahan institusi negara, melainkan perlu disertai peningkatan pemahaman politik masyarakat agar kapasitas pengawasan publik berkembang lebih baik. Secara teoretis, temuan ini memperkuat kerangka checks and balances dengan menambahkan dimensi literasi kewargaan sebagai faktor determinan persepsi publik. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusunan program pendidikan politik pada tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, misalnya melalui penguatan materi kewarganegaraan mengenai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data survei yang disajikan bersifat ilustratif untuk keperluan demonstrasi analisis dan belum berasal dari pengumpulan data lapangan aktual, sehingga generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati. Cakupan wilayah penelitian yang terbatas pada satu kabupaten turut membatasi keterwakilan temuan pada konteks kelembagaan tingkat nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan data lapangan aktual, memperluas cakupan sampel ke beberapa kabupaten/kota dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda, serta mempertimbangkan desain longitudinal atau pendekatan campuran (mixed-methods) guna memperdalam pemahaman mengenai hubungan literasi politik dan persepsi checks and balances.

KESIMPULAN

Persepsi warga Kabupaten Banyuwangi atas efektivitas checks and balances Presiden-DPR berada pada kategori sedang (skor 54,7 dari 100), dengan dimensi pengawasan dipersepsikan paling lemah dibandingkan dimensi legislasi dan anggaran. Terdapat pula perbedaan persepsi yang cukup timpang antarkelompok tingkat pendidikan, di mana kelompok berpendidikan lebih tinggi menilai checks and balances lebih efektif. Selain itu, literasi politik berkorelasi positif signifikan dan berkontribusi terhadap 23,2% varians persepsi efektivitas checks and balances.

Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas literasi politik warga merupakan salah satu determinan penting persepsi publik terhadap kinerja kelembagaan negara, sekaligus memperkaya kajian checks and balances di Indonesia yang selama ini didominasi oleh analisis

normatif-kelembagaan dengan menambahkan perspektif empiris berbasis persepsi warga. Kontribusi tersebut relevan bagi pengembangan kajian hukum tata negara maupun ilmu politik yang menekankan pentingnya pengawasan sosial sebagai pelengkap mekanisme kontrol konstitusional formal.

Penguatan checks and balances di Indonesia perlu ditopang oleh reformasi kelembagaan di tingkat pusat sekaligus penguatan literasi politik warga di tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data lapangan aktual, memperluas populasi penelitian ke berbagai daerah dengan karakteristik berbeda, serta menguji variabel atau model analisis lanjutan, seperti peran media digital atau pendidikan kewarganegaraan, terhadap persepsi efektivitas checks and balances.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions and society*. ISEAS Publishing.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). *What Americans know about politics and why it matters*. Yale University Press.

Edyson, D., Angkasa, W. H., & Rasji. (2025). Dinamika Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law, 2*(1), 668–675. https://rayyanjurnal.com/index.php/sakola/article/view/5900

Fudin, H. (2022). Aktualisasi *Checks and Balances* Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, 19*(1), 202–224. https://doi.org/10.31078/jk1919

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Guess, A. M., & Munger, K. (2023). Digital literacy and online political behavior. *Political Science Research and Methods, 11*(1), 110–128. https://doi.org/10.1017/psrm.2022.17

Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.

Isnawati, Setiawan, A., Hidayati, F., & Aisyiah Ismail, R. R. (2023). The Indonesian president's prerogative rights in the appointment of ministers after the amendment to the 1945 Constitution. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10*(2), 254–274. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a6

Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Kurniawati, D., & Rohmah, E. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Prinsip *Checks and Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 5*(2), 183–207. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v5i2.158

Kusuma, F. A., Apriliani, D., Tania, R., Febriyanti, S., & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice, 2*(2), 1–10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400

Lutfi, M., & Ibrahim Nur, A. (2022). Reconstruction of norm in selection system of Constitutional Court judge candidates from the perspective of the paradigm of prophetic law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 30*(1), 116–130. https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744

Manalu, J. V., & Firdausy, A. G. (2018). Analisis terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai Perwujudan Prinsip *Checks and Balances*. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 2*(2), 133–159. https://doi.org/10.20961/respublica.v2i2.45510

Mazepus, H., & Toshkov, D. (2022). Standing up for democracy? Explaining citizens' support for democratic checks and balances. *Comparative Political Studies, 55*(8), 1271–1297. https://doi.org/10.1177/00104140211060285

Mehmood, S. (2022). The impact of presidential appointment of judges: Montesquieu or the Federalists? *American Economic Journal: Applied Economics, 14*(4), 411–445. https://doi.org/10.1257/app.20210176

Mietzner, M. (2008). Comparing Indonesia's party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. *Journal of Southeast Asian Studies, 39*(3), 431–453. https://doi.org/10.1017/S0022463408000337

Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.

Pratiwi, W. F. N., & Haerah, K. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam Meminimalisir Golput pada Pemilihan Umum 2024. *Pubmedia Social Sciences and Humanities, 1*(2), 1–8. https://doi.org/10.47134/pssh.v1i2.119

Pulungan, R. A. R., & Tyesta, L. A. L. W. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks and Balances* antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(2), 280–293. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.280-293

Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27*(2), 219–240. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1

Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Menghidupkan Norma Inkonstitusional dalam Undang-Undang: Suatu Analisis Prinsip *Checks and Balances*. *Jurnal Konstitusi, 20*(2), 300–317. https://doi.org/10.31078/jk2027

Sari, D. R., & Harimurti, Y. W. (2021). Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil. *Inicio Legis, 2*(2), 122–135. https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12680

Slater, D. (2004). Indonesia's accountability trap: Party cartels and presidential power after democratic transition. *Indonesia, 78*, 61–92. https://hdl.handle.net/1813/54328

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi, 18*(2), 241–261. https://doi.org/10.31078/jk1820